

POLITISASI KABINET KERJA INDONESIA HEBAT JOKOWI-JK

Mikael Loi

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Malang

Email : mikael_loi@yahoo.com

Abstract: *The tradition of Indonesian political elite is politicization. The style in sharing the position or dividing the power became a habit in getting the support. frequently, Jokowi-JK stated in their campaign that there were no position-sharing. It became a kind of challenge for them in getting the support. This research purposed to know how the politicization on the team-work of Jokowi-JK concerned to the passage analysis according to Norman Fairclough for instance text, passage practice and culture social practice. The data object of this research was the team –work news of Jokowi-JK on Republika.co.id date on October 26 until 28 in the year 2014. The result of this research explained that there was a politicization or power-sharing which was conditioned by Jokowi-JK signed with the intervention of some ministers who became the member of political party that was the government supporting party like the minister of Badan Usaha Milik Negara (BUMN), she was ms. Rini Soemarno then the minister of human building and culture, she was ms. Puan Maharani. It caused of the human-interest between the president Jokowi, Yusuf Kalla also the party-chairperson of Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) like the minister of nautica, she was ms. Susi Pudjiastuti the Religion Minister, he was mr .Lukman Hakim Syafuddin.*

Key words: *Politicization, Tradition and Passage*

Abstrak: Politisasi telah menjadi sebuah tradisi bagi elit politik Indonesia. Gaya bagi-bagi kursi atau bagi-bagi kekuasaan menjadi sebuah kebiasaan dalam mendapatkan dukungan. Berulang kali janji kampanye Jokowi-JK yang menyatakan bahwa, tidak adanya bagi-bagi jabatan atau kursi menjadi sebuah tantangan bagi Jokowi-JK dalam mendapatkan dukungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Politisasi pada Kabinet Kerja Jokowi-JK dilihat dari Analisis Wacana menurut Norman Fairclough yang meliputi teks, praktik wacana dan praktik sosial budaya. Objek data penelitian ini adalah berita kabinet kerja Jokowi-JK pada Republika.co.id, edisi tanggal 26-28 Oktober 2014. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, adanya politisasi atau bagi-bagi kekuasaan oleh Jokowi-JK yang ditandai dengan keterlibatan beberapa menteri yang merupakan anggota politik partai yang berasal dari partai pendukung pemerintah seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, serta terlibatnya beberapa menteri yang ditetapkan karena kedekatan emosional, baik antara presiden Jokowi, Yusuf Kalla serta ketua umum partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti Menteri Kemaritiman Susi Pudjiastuti, Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin

Kata kunci : Politisasi, Tradisi dan Wacana

PENDAHULUAN

Politisasi telah menjadi sebuah tradisi dikalangan elit politik dalam mendapatkan kekuasaan, hal tersebut menjadi sebuah hal yang kontroversi jika dikaitkan dengan sistem demokrasi Pancasila yang sebenarnya. Seyogyanya, profesionalitas, integritas serta komitmen dari elit politik dalam merealisasikan janji kampanye. Realitas bahwa timbulnya wacana-wacana politik, diduga adanya bagi-bagi jabatan atau kursi yang dilakukan oleh Jokowi-JK

Menurut Rochajat Darun dan Sumarno (2006:217) dalam bukunya komunikasi politik menyatakan bahwa terbentuknya wacana dapat berlatar belakang kepentingan dan perhatian kelompok individu infrastruktur atau elit-elit infrastruktur karena terkait didalamnya 1) Popularitas dan *prestise* pribadi kelompok, 2) Mengejar prestasi lebih tinggi, 3) Mempertahankan status quo, 4) Menumbuhkan dukungan lingkungan agar berpihak kepada kelompoknya.

Fenomena politisasi penempatan kabinet kerja yang dianggap tidak konsisten, menjadi topik yang menarik dimedia sosial maupun media massa, salah satu janji kampanye oleh presiden Jokowi-Jk adalah “berkaitan dengan penyusunan kabinet yang ramping dan ditempati oleh kaum profesional (nonpartai) dan menteri tidak boleh rangkap dengan jabatan partai politik (PARPOL), dan koalisi tanpa syarat atau tanpa bagi-bagi kekuasaan” (Republika.co.id edisi 22 September 2014). Terbentuknya opini publik terhadap pemerintah adalah janji-janji kampanye tidak direalisasikan secara baik, penempatan figur-figur kabinet berasal dari kaum politisi dan adapula berlatar belakang pendidikan sekolah menengah pertama. Dari janji kampanye Jokowi-JK secara jelas dilihat setelah ditetapkannya menteri Kabinet Kerja bahwa diduga adanya Politisasi, yaitu dengan keterlibatan beberapa menteri yang merupakan anggota partai politik aktif yang berasal dari partai pengusung (PDIP) dan partai koalisi, yaitu (HANURA, PKB, NASDEM) serta terlibatnya menteri yang terindikasi kasus korupsi yang terpilih sebagai menteri. Hal tersebut tentu menjadi kontradiktif dengan kemauan semua pihak tentang berjalan dan tidaknya roda pemerintah. Melihat persoalan tersebut maka disini penulis mengambil judul penelitian “POLITISASI KABINET KERJA JOKOWI-JK”(ANALISIS WACANA PADA REPUBLIKA.CO.ID EDISI 26-28 OKTOBER).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Wacana dengan paradigma kualitatif, sebab analisis yang dimaksudkan untuk mengetahui politisasi Kabinet Kerja Jokowi-Jk yang termuat dalam berita di Republika.co.id edisi tanggal 26-28 oktober 2014. Metode analisis wacana merupakan sebuah metode yang berusaha untuk menggali informasi yang sebenarnya terkait dengan perkembangan opini publik melalui media massa. Menurut Eriyanto 2005:5 (dalam Kriyantono 2006:258) menjelaskan bahwa analisis wacana sebagai suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan, sedangkan menurut Mills 1997:8. Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan adalah model Norman Fairclough antara lain teks, praktik wacana dan praktik sosial budaya. Dan yang dijadikan sebagai objek penelitian ini adalah berita tentang Politisasi Kabinet Kerja Jokowi-JK pada Republika.co.id edisi tanggal 26-28 Oktober 2014. Menurut Norman Fairclough (dalam Rachmat 2006:260) menjelaskan model analisis wacana, mencakupi 3 unsur yaitu :Teks, Praktik wacana, Praktik sosial budaya.

Sumber data pada penelitian ini antara lain meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yaitu berita yang berkaitan dengan Kabinet Kerja serta data sekunder meliputi data- data dari internet dalam melengkapi penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dari berita yang dihimpun pada tanggal 26-28 Oktober 2014, dapat ditemukan beberapa unsur dari hasil kajian analisis data, yang berkorelasi dengan politisasi pada kabinet kerja Jokowi-JK menurut analisis Norman Fairclough yang meliputi, Teks, Praktik Wacana, Praktik Sosial Budaya antara lain :

1. Koalisi Merah Putih Tuntut Kabinet Realisasikan Janji
 - a. Konsolidasi partai politik dalam kabinet kerja Jokowi-JK

- b. Kabinet Kerja Jokowi-JK tidak ramping, dan tidak profesional.
 - c. Jokowi-JK tidak mengindahkan rekomendasi dari KPK dan PPATK terhadap calon menteri yang terindikasi kasus korupsi
2. Kabinet Jokowi-JK dinilai tak mencerminkan ajaran Trisakti Bung Karno :
Jokowi-JK tidak mengindahkan rekomendasi dari KPK dan PPATK terhadap calon menteri yang terindikasi kasus korupsi
3. Muhammadiyah bersyukur tak gabung kabinet kerja yang penuh kebohongan:
Profesionalitas Presiden Jokowi-JK dipertanyakan dalam menetapkan calon menteri.
4. Menteri pilihan Jokowi-JK ini diragukan kemampuannya.
 - a. Mantan menteri Badan Usaha Milik Negara pesimistik terhadap kapabilitas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno,
 - b. Mardiasmo menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (WAMENKEU) dengan kapabilitas yang belum teruji.
5. bagaimana Republika menyajikan berita tentang penetapan Kabinet Kerja Jokowi-JK?

Peran Ketua Umum PDIP dan Konsolidasi Partai Politik

Peran Ketua Umum PDIP dalam Penetapan Kabinet.

Dalam pengangkatan Kabinet Kerja Jokowi-JK diketahui bahwa, adanya pengaruh peran ketua umum partai koalisi yang tergabung dengan partai pengusung dalam mendukung jalannya pemerintahan. Komposisi kabinet kerja Jokowi-JK periode 2015-2019 terdiri dari 34 menteri yang diisi oleh 16 dari elit politik dan 18 dari profesional. Pemilihan dan penetapan menteri merupakan hak konstitusi presiden, hal tersebut telah diatur dalam undang-undang kementerian No 38 Tahun 2008 Bab IV pasal 12 tentang Pengangkatan, Pembubaran dan Perubahan Kementerian. Akan tetapi realitas dalam pengangkatan menteri, hak presiden disabotase oleh ketua umum partai PDIP. Karena secara nyata dilihat bahwa, keterlibatan beberapa menteri seperti Rini Soemarno sebagai menteri BUMN dan Lukman Hakim sebagai menteri Agama, merupakan anggota partai politik, juga besar andil ketua umum partai politik PDIP dilihat dari kedekatan emosional dari kedua menteri tersebut dengan ketua umum PDIP. Sehingga dapat kita ketahui, bahwa peran ketua umum dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan kementerian mempunyai pengaruh yang sangat besar.

Hasil Konsolidasi Partai Pendukung dalam Penetapan Kabinet Jokowi

Komunikasi politik partai pengusung Jokowi-JK, berjalan dengan efektif, sehingga meleburnya beberapa partai yang mendukung partai pengusung antara lainnya PKB, HANURA, NASDEM yang tergabung dalam (KIH). Menurut Rauf (2006:3) menjelaskan bahwa Komunikasi sebagai sebuah kegiatan politik yaitu penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Sedangkan menurut Kantaprawira (2006:3) komunikasi politik merupakan, upaya untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran internal golongan, instansi, asosiasi, ataupun sektor politik pemerintahan.

Dari definisi diatas, sangat jelas bahwa komunikasi politik merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dalam menyamakan persepsi antar golongan sehingga nawa cita pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Menurut Mondry (2006:7) komunikasi dikatakan efektif apabila seluruh unsur terkait dalam proses itu berjalan dengan baik pula, dengan tujuan bahwa kegiatan komunikasi antara lain agar pesan dapat dimengerti pihak yang diajak berkomunikasi, agar gagasan dapat diterima, supaya mendapat pemahaman orang lain dalam mendapatkan tujuan. Sehingga dari kasus diatas dapat

dijelaskan bahwa terbentuknya koalisi Indonesia Hebat (KIH) merupakan hasil dari komunikasi politik yang dijalankan oleh Jokowi-JK, dengan sistem bagi-bagi kursi kepada partai pendukung pemerintahan. Secara sederhana bahwa hasil dari komunikasi politik Jokowi-JK yang membentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) antara lain ,Partai Kesatuan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dari ke empat partai diatas merupakan partai yang termasuk dalam koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pemerintahan.

Ditinjau secara empiris bahwa, komposisi kabinet kerja terdiri dari 16 orang yang berangkat dari anggota partai politik aktif pendukung Pemerintah seperti Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (Pardpol-PDIP), Menteri Hukum dan Ham: Yasonna H. Laoly (PDIP), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi (Hanura), Menteri BUMN: Rini M Soemarno merupakan utusan (PDIP), Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Hanura) Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDIP), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdijatno (Nasdem), Menteri Koperasi dan UMKM: AAGN Puspayoga (PDIP), Menteri Tenaga Kerja: Hanif Dhakiri (PKB), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Nasdem), Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan (Nasdem), Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa (PKB), Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (PKB), Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (PKB). Sejumlah menteri yang menjadi wakil partai didominasi oleh partai pendukung pemerintah. (<http://kompas.com> 2014).

Pencitraan Jokowi Menerapkan Konsep Trisakti Bung Karno

Hasil konsolidasi Jokowi-JK dengan kementerian bahwa Jokowi-JK akan menerapkan konsep Trisakti Bung Karno dalam kabinet Kerja. Hal tersebut mengikuti konsep Trisakti Bung Karno dengan 3 pilar utama yaitu :

- a. Berdaulat di bidang politik
- b. Berkepribadian budaya, dan
- c. Berdikari di bidang ekonomi

3 pilar tersebut, sebagai misi utama Bung Karno dalam kabinetnya yang harus direalisasikan sebagai upaya dalam memantapkan di bidang politik, budaya dan ekonomi dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Konsep Trisakti bung Karno diimplementasikan oleh Jokowi-JK dalam kabinetnya, sebagai wujud eksistensi dari konsep Trisakti tersebut, dengan menyaring kabinet yang terdaftar melalui tahap penyaringan yang melibatkan beberapa instansi pemerintah. Namun penerapan konsep Trisakti menuai kontroversi karena tidak sesuai dengan profesionalitas Jokowi-JK. Diantaranya adalah masuknya sosok menteri yang terindikasi kasus korupsi, serta tidak adanya Menteri Ekonomi Kreatif. Selain Rini Soemarno, hasil konsolidasi dan pemberlakuan peran ketua umum partai yaitu dengan terlibatnya menteri Kemaritiman yaitu Susi Pudjiastuti. Terpilihnya menteri tersebut menuai kontroversi karena dilihat dari latar belakang dari menteri tersebut yaitu latar belakang pendidikan dan kondisi keluarga. Latar belakang dari menteri Kemaritiman yaitu dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta menteri tersebut bersuamikan Warga Negara Asing (WNA). Kontroversi muncul ketika dalam visi dan misi Jokowi-JK adalah mengutamakan pendidikan tetapi pengangkatan calon menteri yang berlatar belakang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Janji kampanye Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden menjelaskan bahwa akan adakan perampangan kabinet, namun pada kali ini adalah bukan perampangan kabinet tetapi didalam struktur kabinet terjadi pembaharuan, yang antara lain, pembaharuan tersebut terjadi kontroversial yaitu adanya

perubahan pada menteri Ekonomi Kreatif atau dengan kata lain yaitu menteri ekonomi kreatif ditiadakan. Pada dasarnya bahwa, Ekonomi Kreatif mempunyai peranan dan memberikan sumbangan yang besar bagi perekonomian Indonesia yang berada pada semua bidang, sehingga langkah dalam meningkatkan ekonomi kreatif perlu dibutuhkan regulator, dengan memberikan dukungan melalui kebijakan. Tetapi perubahan pada kementerian kreatif diterapkan oleh Jokowi-JK yaitu dengan membentuk badan pengawal terhadap perkembangan ekonomi Kreatif dalam rangkan mengontrol setiap kegiatan dan mempunyai kebijakan yang jelas.

Kabinet Kerja Tidak Ramping dan Tidak Profesional

Nawa Cita Jokowi-JK

Adapun visi dan misi dari pemerintahan Jokowi-JK dalam tercapainya tatanan masyarakat yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Visi dan misi tersebut tertuang dalam nawa cita :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. (<http://kompas.com/read.2014>)

Maka dalam mewujudkan sembilan program atau nawa cita tersebut, Jokowi-JK membutuhkan sebuah komposisi kabinet yang benar-benar profesional dan efisien sehingga dapat berjalan efektif. Hal itu tercermin dalam kampanye Jokowi-JK dimana beliau menyatakan, akan membentuk kabinet yang ramping dan profesional.

Perampingan Kabinet dan Profesionalitas ala Jokowi-JK

Bertolak dari komposisi kabinet kerja yang dibentuk oleh presiden Jokowi-Jk bahwa jumlah kementerian sebanyak 34 kementerian yaitu 16 berasal dari anggota partai politik pendukung pemerintahan, dan 18 orang berangkat dari kaum profesional. komposisi beberapa kementerian dikolaborasikan menjadi satu kementerian dan adanya perubahan nama kementerian misalnya pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Perumahan Rakyat dipisahkan namun di era Jokowi-JK antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat digabungkan menjadi satu kementerian serta Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup di era Susilo Bambang Yudhoyono dileburkan menjadi satu kementerian tetapi di era Jokowi-JK dipisahkan menjadi 2 Kementerian serta kementerian Pertanian diubah menjadi menteri Pangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan dirubah menjadi menteri Kemaritiman. Dari komposisi kementerian yang ditetapkan oleh Jokowi-JK dari jumlahnya sama dengan jumlah kabinet yang ditetakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Kabinet Bersatu Jilid II yaitu sebanyak 34 kementerian dan ditambah dengan 3 Pejabat Negara yaitu Ketua Unit Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kepala

Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (<http://kompas.com>.2014).

Ketidak profesional pada Jokowi-JK diketahui dengan tidak menepati janji kampanye dan masuknya beberapa menteri yang terindikasi kasus korupsi, serta indikasi menteri yang berasal dari partai yang tidak tunduk pada presiden melainkan tunduk pada ketua umum partai dan adanya menteri yang tidak sesuai dengan tupoksi pada kementerian. Seperti halnya penetapan Rini Soemarno yang diduga terlibat dalam kasus dan diberi *warning* oleh KPK dan PPATK. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya sikap profesional yang dimiliki Jokowi karena tidak mengindahkan *warning* sebuah lembaga yang mempunyai otoritas dalam menangani dan menganalisis suatu hukum.

Efektifitas Penetapan Kabinet menurut UUD

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara hukum (*law*). Maka bertolak dari Undang-Undang Dasar (UUD) tersebut yang menjadi acuan bagi seseorang dalam bertindak, hal tersebut sama seperti Jokowi sebagai presiden Indonesia dalam memilih dan menetapkan kabinetnya. Konstitusi merupakan landasar dasar bagi warga Negara dalam bertindak, hal ini tentu Undang-Undang Dasar perlu ditaati, karena konstitusi merupakan aturan yang tertulis atas dasar hasil kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan realitas yang terjadi.

Menurut Efriza (2009:147) secara harafian konstitusi berasal dari kata kerja yaitu “*constituer*” dari bahasa Prancis yang berarti membentuk. Konstitusi dipergunakan untuk membentuk negara, sehingga konstitusi mengandung makna permulaan dari segala bentuk peraturan mengenai suatu negara. Namun selain konstitusi dikenal juga Undang-Undang Dasar (UUD) dan hukum dasar. Namun menurut Oliver Cromwell (dalam Efriza 2009:148) menjelaskan bahwa *Lord protector* Inggris pada 1649-1660. Ia menamakan undang-undang dasar sebagai *instrument of government* dibuat sebagai pegangan untuk memerintah oleh pemerintah, yang kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat yang dituangkan dalam konstitusi negaranya pada tahun 1787.

Menurut Budiarjo (2004:101), menjelaskan bahwa setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut :

1. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam negara federal pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintahan federal negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut *Bill of Right* kalau membentuk naskah sendiri)
3. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan referensi diatas, yang menyatakan bahwa konstitusi merupakan landasan atau instrument dalam pemerintahan dalam memerintah. Hal tersebut tentu juga merupakan acuan dalam pemerintahan. Maka, konstitusi merupakan awal dari bentuk peraturan suatu negara.

Undang-Undang kementerian yang mengatur dalam memilih dan membubarkan menteri yang diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 2008, Bab IV tentang Pembentukan, Pengubahan dan Pembubaran Kementerian, bagian ke satu pasal (12) tentang pembentukan kementerian yaitu Presiden membentuk Kementerian Luar Negeri, dalam negeri, dan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 13 ayat 1, yang menjelaskan bahwa, Presiden membentuk kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) serta ayat 2 menjelaskan bahwa, pembentukan kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mempertimbangkan :

- a. Efisiensi dan efektifitas
- b. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas
- c. Kesenambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau
- d. Perkembangan lingkungan global.

Secara konstitusi sangat jelas bahwa, presiden mempunyai otoritas dalam menetapkan kementerian, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan sebagai acuan utama presiden dalam menetapkan menteri, namun dalam mempertimbangkan cakupan tugas dan proporsional beban kerja belum dipertimbangkan secara baik. Hal ini diketahui dengan terlibatnya beberapa menteri, yang kapabilitasnya masih dalam tanda tanya. Misalnya dengan terpilihnya Rini Soemarno sebagai menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari rekam jejak Rini Soemarno, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa selama Rini Soemarno menjabat sebagai menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2005 masa Presiden Megawati, belum ada hal brilliant yang dilakukan oleh Rini Soemarno, sehingga menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan kapabilitas Rini Soemarno, karena dipilih menjadi menteri BUMN merupakan posisi kementerian yang mempunyai tanggung jawab besar dan intervensi non korporasi sangat tinggi.

Jokowi Tidak Merujuk Rekomendasi dari KPK dan PPAT

Proses pemilihan dan penetapan calon menteri oleh Jokowi-JK melalui beberapa tahap sebelum disahkan menjadi menteri. Proses pemilihan melalui tahap seleksi dengan melibatkan beberapa instansi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) sebagai upaya menciptakan kabinet yang bersih dan jauh dari korupsi.

Keterlibatan instansi-instansi yang ditentukan oleh Jokowi dalam rangkai menyeleksi calon menteri dalam mengantisipasi calon menteri yang terindikasi dalam kasus korupsi dan kasus lainnya. Namun yang menjadi pertanyaan bahwa, apakah dengan keterlibatan KPK, PPATK dan KOMNASHAM merupakan sebuah terobosan menuju kabinet yang bersih dan jauh dari korupsi serta bebas dari politisasi? Drama politik dalam pemilihan calon kabinet kerja yang dijalankan oleh Jokowi-JK dengan melibatkan instansi-instansi terkait merupakan strategis dalam mendapatkan reputasi, yang *finishnya* tetap terpilihnya beberapa menteri yang terindikasi kasus.

Upaya dalam menciptakan pemerintahan beserta jajaran agar terhindar dari segala macam indikasi kasus lainnya maupun yang lebih *trendnya* adalah korupsi, Jokowi-JK menerapkan segala cara antara lain melibatkan instansi-instansi penegak hukum dalam pemilihan calon menteri. Upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, akan tetapi melibatkan dan menetapkan calon menteri yang terindikasi kasus korupsi. Calon menteri yang terindikasi dalam kasus yang dilaporkan oleh Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara lain yaitu Rini Soemarno, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman (<http://liputan6.com>.2014).

JOKOWI-JK Menetapkan Dua Menteri Yang Kapabilitasnya Dipertanyakan

Pengangkatan sejumlah menteri menjadi hak prerogratifnya seorang presiden terpilih, namun juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menetapkan menteri. Akan tetapi yang menjadi kontradiksi dalam penetapan calon menteri yang dijalankan oleh Jokowi-Jk adalah menempatkan komposisi menteri yang belum diketahui kapabilitasnya dalam birokrasi. Dari kabinet Jokowi-Jk salah

satunya adalah Rini Soemarno yang menjabat sebagai menteri Badan Usaha Milik Negara yang belum diketahui rekam jejaknya.

Pemilihan dan penetapan menteri daerah Jokowi-JK mempunyai hal yang menarik, hal ini ditandai dengan terpilihnya beberapa menteri hanya karena faktor kedekatan antara Presiden Jokowi, Yusuf Kalla dan Megawati sebagai ketua umum fraksi PDIP. Seperti beberapa menteri yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam pemilihan dan penetapan menteri tidak terlepas dari andil ketua umum partai. Beberapa menteri yang ditetapkan berdasarkan faktor kedekatan seperti Rini Soemarno, Susi Pudjiastuti, Sofyan Djalil. Dari beberapa menteri tersebut ditetapkan walaupun secara kinerja selama menjabat sebagai menteri ataupun di birokrasi dimasa-masa sebelumnya belum diketahui atau masih diragukan oleh publik.

Cara Republika Menyajikan Berita Tentang Kabinet Kerja Jokowi – JK

Latar belakang pembentukan media Republika bahwa Republika Online terbentuk yang berawal dari media cetak Koran Harian, yang terbentuk oleh Cendekiawan Islam, dengan konstalasi politik era orde lama, pers tertekan oleh rezim Suharto sehingga khususnya umat Islam seakan kebingungan dalam mengaspirasikan suaranya, sehingga dengan tekanan pemerintah terhadap pers maka lahirlah Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI). Berdasarkan latar belakang media Republika yang mempunyai paradigma politik aliran maka dapat dijelaskan bahwa politisasi pada kabinet kerja Jokowi-JK merupakan tindakan yang dilakukan oleh media republika, dengan diketahui bahwa setiap berita yang dimuat dalam media republika berkaitan dengan isu-isu politik tentang Jokowi-JK merupakan sebuah usaha dalam melemahkan kekuatan Politik Jokowi-JK. Sehingga sederhananya adalah media tersebut adalah kontra Jokowi-JK.

KESIMPULAN

Pada berita Kabinet Kerja Jokowi-Jk edisi tanggal 26-28 Oktober menjelaskan bahwa adanya Politisasi Kabinet Kerja oleh Jokowi-Jk yang ditandai dengan adanya keterlibatan menteri yang merupakan anggota partai politik pendukung pemerintah, yaitu partai-partai yang termasuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang antara lain Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy. Dalam menetapkan komposisi kabinet dipengaruhi oleh faktor internal partai penguasa yaitu Partai Demokrat Indonesia (PDIP) karena bisa dikatakan adalah saham terbesar ada dipartai tersebut. Sehingga peran ketua umum partai, ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan komposisi kabinet. Sehingga faktor internal partai penguasa pemerintah yaitu dari ketua umum partai dan berikutnya adalah faktor Jusuf Kalla yang selaku wakil Presiden juga ikut berperan dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan komposisi kabinet. Sehingga kalau dilihat komposisi kabinet yang berasal dari partai politik, yang mendominasi adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dari berita-berita yang tertuang dalam edisi 26-28 Oktober dalam Republika.co.id menjelaskan bahwa wartawan dalam menuliskan berita, terdapat opini wartawan atau ideologi wartawan yang tertuang dalam berita tersebut dengan paradigma religius. Sehingga pola pikir wartawan dipengaruhi oleh pandangan agama dan mengacuh pada aturan dan norma agama sehingga mempengaruhi dalam penulisan dan penyajian berita yang dimuat dalam Republika.co.id. Bertolak dari latar belakang media, Republika Online terbentuk berawal dari media cetak (Koran Harian), yang terbentuk oleh Cendekiawan Islam,

dengan konstalasi politik era orde lama, pers tertekan oleh rezim Suharto. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dalam penyajian berita, wartawan dipengaruhi oleh paradigma agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo Miriam .2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Efriza. 2009. *Ilmu Politik (dari ilmu politik sampai ilmu pemerintahan)*. Bandung : Alfa Rachmat
- Harun dan Sumarno. 2006. *Komunikasi Politik sebagai Pengantar*. Bandung : Mandar Maju.
- Inu Kencana. 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Kriyastono Rachmat. 2006. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana
- Marijan, Kacung. 2011. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Mondry. 2008. *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*. Malang: Ghalia Indonesia.
- Kompas. 2014. Menteri Jokowi Yang Berasal Dari Partai Politik. [online] available at (<http://nasional.kompas.com/read/2014/1026/18101431/Ini.15.Menteri.Jokowi.yang.Berasal.dari.Partai.Politik>).tanggal akses 02/02/2015.
- Republika. 2014.Pengamat Soroti Sofian Djalil Jadi Menteri. [online] available at (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/25/ne0a2d-pengamat-soroti-sofyan-djalil-jadi-menteri>). tanggal akses 10/12 2014.
- Wardani.2014. kondisi politik indonesia sulit capai konsolidasi demokrasi. [online] available at(<http://uiupdate.ui.ac.id/article/kondisi-politik-indonesia-pasca-2014-sulit-capai-konsolidasi-demokrasi>).tanggal akses 20/11/ 2014